



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SOEPARJANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI
3. NHK : 763882

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/172 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/160 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/136 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **409.650.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, PIAGIO VESPA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
5. LAINNYA, ORBEA SEPEDA MTB Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 650.000
6. MOTOR, HONDA CBR 250 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000



7. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

8. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.150.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 124.055.109

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.934.855.109

III. HUTANG Rp. 14.054.019

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.920.801.090

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.